

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum, pengguna laporan keuangan mempunyai kepentingan untuk dapat mengetahui secara akurat dan jelas kondisi suatu perusahaan agar mendapatkan keyakinan memadai untuk pengambilan keputusan. Hal ini menjadi kewajiban bagi penyaji laporan keuangan untuk dapat memenuhi harapan para pengguna, sebab laporan keuangan yang merupakan catatan tertulis berisi kinerja manajemen dalam satu periode tertentu telah dipandang sebagai media yang digunakan sebagai alat untuk menurunkan adanya *gap* atau perbedaan informasi antara pihak manajemen perusahaan dan pihak eksternal seperti investor dan kreditur.

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang telah menyajikan laporan keuangan usai diaudit, tidak jarang melakukan pelaporan kembali (*restatement*) laporan keuangan yang telah diterbitkan kepada pasar atau pihak investor. Peristiwa ini memunculkan pertanyaan mengenai apa yang menyebabkan laporan keuangan yang telah diterbitkan tetapi kemudian dilakukan *restatement*. Suatu kesalahan pada penyajian laporan keuangan yang kemudian dikoreksi dapat menimbulkan kesalahan dalam interpretasi informasi oleh para pengguna.

Isu tentang *restatement* di Indonesia terjadi di tahun 2002 pada PT Kimia Farma. Pada laporan keuangan periode 2001, laba bersih yang dilaporkan

manajemen PT Kimia Farma sebesar Rp 132 milyar. Bapepam-LK menilai laba bersih yang dilaporkan tersebut dianggap terlalu besar dan direkayasa. Setelah dilakukan pemeriksaan dan diadakan audit kembali, pada tanggal 3 Oktober 2002 PT Kimia Farma melakukan penyajian kembali (*restated*) laporan keuangan untuk periode 2001 karena telah terungkap bahwa terjadi lebih saji (*overstated*) sebesar Rp 32,7 miliar atau 24,7% dari laba awal yang sebelumnya dilaporkan (Tempo, 2002)

Berdasarkan penyelidikan Bapepam-LK, KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa yang melakukan audit pada laporan keuangan PT Kimia Farma dinyatakan telah menjalankan audit sesuai standar yang berlaku, tetapi tidak berhasil mendeteksi adanya kecurangan. Akibat penyajian kembali ini, Kementerian BUMN memutuskan untuk menghentikan proses divestasi saham milik Pemerintah di PT Kimia Farma. Bapepam-LK memberikan sanksi administratif sebesar Rp 500 juta kepada PT Kimia Farma, Rp 1 milyar terhadap direksi lama PT Kimia Farma, dan Rp 100 juta kepada auditor eksternal sebagai bagian kegagalan dalam mendeteksi risiko audit (Siaran Pers Bapepam-LK 2002 dalam Kusuma dan Rohman, 2014).

Selain itu, dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2014, peneliti telah menemukan 45 perusahaan yang melakukan penyajian kembali laporan keuangan dengan berbagai penyebab. Sebagai contoh, PT. Dyviacom Intrabumi Tbk dan PT. Asiaplast Industries Tbk pada tahun 2012 melakukan penyajian kembali laporan keuangan periode sebelumnya karena terdapat kesalahan perhitungan matematis yang berkaitan dengan perhitungan liabilitas imbalan kerja jangka panjang dan

pajak tangguhan. Di tahun 2013, adanya kesalahan pencatatan pada pengakuan awal aset keuangan perusahaan di tahun sebelumnya membuat PT. Trimegah Securities Tbk menyajikan kembali laporan keuangan tahun 2012. PT Astra Otoparts Tbk juga melakukan penyajian kembali laporan keuangan 2013 karena pada tahun 2014 diketahui bahwa persediaan tertentu lebih catat dan menyebabkan kurang catat beban pokok pendapatan di tahun sebelumnya. Ditemukannya 55 perusahaan di Indonesia yang melakukan *restatement* di tahun 2010 sampai dengan 2014 merupakan indikasi bahwa penyajian kembali laporan keuangan dapat terjadi pada perusahaan di bidang apa saja, meskipun kemungkinan keterjadiannya kecil.

Corporate governance atau tata kelola perusahaan dapat memberikan pengaruh langsung pada manajemen perusahaan. Abdullah (2010) berpendapat bahwa *corporate governance* berperan sebagai suatu alat untuk mendisiplinkan, mengamati, dan memantau manajemen. Oleh sebab itu, tata kelola perusahaan yang dijalankan dengan baik (*good corporate governance*) dapat meminimalisasi tindakan kecurangan oleh manajemen yang merugikan pemilik perusahaan. Dari contoh kasus pada PT Kimia Farma, terjadinya *restatement* merupakan hasil dari “ulah” internal perusahaan yang mengindikasikan tidak berjalannya mekanisme *corporate governance* dengan baik. Mekanisme *corporate governance* adalah cara efektif yang dapat digunakan untuk mengawasi masalah kontrak dan mengurangi kemungkinan perilaku oportunistik oleh pihak manajemen.

Dampak negatif dari terjadinya penyajian kembali telah dibuktikan dalam berbagai penelitian. Palmrose (2004) yang meneliti reaksi pasar terhadap

restatement menghasilkan temuan bahwa adanya *return* abnormal negatif pada tanggal ketika diumumkan bahwa perusahaan melakukan *restatement*. Selain itu, *financial restatement* juga menyebabkan kerusakan legitimasi organisasi (Arthaud-Day, 2006). Menurut Lounsbury dan Glynn (2001) legitimasi organisasi meningkatkan akses perusahaan terhadap sumber daya penting, seperti modal keuangan, intelektual, manusia (karyawan), dan teknologi. Oleh karena itu, legitimasi penting untuk keberhasilan perusahaan. Kester (2013) mengungkapkan pula bahwa *financial restatement* merupakan suatu kejadian yang memakan biaya sekaligus menurunkan legitimasi organisasi dan dapat menghasilkan risiko lebih tinggi bagi para pemangku kepentingan.

Melihat dampak negatif yang ditimbulkan, khususnya bagi perusahaan *go public*, *financial restatement* merupakan masalah yang sangat penting dan telah mendapat banyak perhatian dari akademisi, peneliti, regulator, dan praktisi (Abdullah, 2010). US *General Accounting Office* atau GAO (2002) meyakini bahwa *restatements* yang terjadi menjadi cerminan akan lemahnya praktik tata kelola perusahaan.

Berbagai penelitian terdahulu telah memberikan bukti bahwa mekanisme *corporate governance* berkorelasi dengan keterjadian *restatement*. Hasil penelitian Veronica dan Yanivi (2005) menghasilkan temuan bahwa independensi dari dewan komisaris, kepemilikan saham oleh institusi, dan kualitas audit memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap keterjadian *restatement*. Sedangkan ukuran dari dewan komisaris dan kepemilikan saham oleh *blockholder* ditemukan tidak memiliki pengaruh yang signifikan.

Bertentangan dengan hasil temuan Veronica dan Yanivi (2005), penelitian Abdullah (2010) memberikan bukti bahwa independensi dewan komisaris tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterjadian *restatement* tetapi kepemilikan *blockholder* ditemukan memiliki pengaruh negatif yang signifikan. Penelitian Yuristisia (2008) memberikan bukti bahwa ukuran dari dewan komisaris dan independensi dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap keterjadian *restatement*.

Selain itu, telah dilakukan pula beberapa penelitian mengenai karakteristik dari komite audit khususnya keahlian keuangan dari anggotanya. Penelitian Lin (2006) dan Rani (2011) memberikan bukti bahwa keahlian keuangan komite audit tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keterjadian *restatement*. Temuan ini berbeda dengan hasil penelitian Abbott (2003) serta Lary dan Dennis (2011) yang menunjukkan bahwa keahlian keuangan komite audit berpengaruh negatif yang signifikan terhadap keterjadian *restatement*.

Dari pemaparan penelitian-penelitian terdahulu, terdapat ketidak konsistenan atau hasil dari penelitian yang saling bertentangan. Pengaruh independensi dewan komisaris dan keterjadian *restatement* pada penelitian Veronica dan Yanivi (2005) dinyatakan memiliki pengaruh negatif yang signifikan, sementara dalam penelitian Abdullah (2010) dinyatakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan, sedangkan pada penelitian Yuristisia (2008) dinyatakan memiliki pengaruh positif. Selain itu, pengaruh ukuran dewan komisaris dan keterjadian *restatement* pada penelitian Veronica dan Yanivi (2005) dinyatakan tidak memiliki pengaruh signifikan, sementara pada penelitian

Yuristisia (2008) dinyatakan berpengaruh positif. Begitu pula pengaruh keahlian keuangan komite audit terhadap keterjadian *restatement* pada penelitian Lin (2006) dan Rani (2011) dinyatakan tidak memiliki pengaruh signifikan, tetapi pada penelitian Abbott (2003) serta Lary dan Dennis (2011) dinyatakan memiliki pengaruh negatif yang signifikan.

Berdasarkan adanya ketidakkonsistenan hasil dan mengingat banyak dampak negatif dari keterjadian *restatement*, penulis tertarik untuk melakukan pengujian kembali. Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari penelitian Veronica dan Yanivi (2005), hanya saja dalam penelitian ini variabel keberadaan komite audit tidak digunakan. Peneliti mengasumsikan kini seluruh perusahaan publik memiliki komite audit karena telah diterbitkannya peraturan Bapepam-LK melalui Surat edaran Bapepam Nomor SE-03/PM/2000 yang merekomendasikan perusahaan-perusahaan publik memiliki Komite Audit dan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 yang mewajibkan emiten atau perusahaan publik memiliki komite audit. Dengan menganalisis penelitian-penelitian terdahulu yang menggunakan variabel dependen sama yaitu keterjadian *restatement*, peneliti menambahkan satu variabel independen yaitu keahlian keuangan komite audit untuk digabungkan dengan model penelitian sebagai perbedaan dengan penelitian Veronica dan Yanivi (2005).

Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis hubungan antara karakteristik *corporate governance* seperti dewan komisaris, komite audit, struktur kepemilikan saham dalam perusahaan, dan kualitas audit terhadap keterjadian

restatement. Sampel perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini diidentifikasi menurut *US General Accounting Office's classification of restatement*, serupa dengan pemilihan sampel pada penelitian Veronica dan Yanivi (2005). Perusahaan yang melakukan *restatement* karena adanya proses merger dan akuisisi, *stocksplits*, dan penerapan PSAK baru tidak dilibatkan dalam sampel penelitian karena faktor-faktor tersebut dihasilkan dari aktivitas normal perusahaan dan tidak merupakan kejadian *irregular*. Sampel diambil dari seluruh perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang melakukan *restatement* pada periode 2010-2014.

Penelitian ini menggunakan variabel terikat (*dependen*) keterjadian *restatement* dan variabel bebas (*independen*) meliputi independensi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, keahlian keuangan komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan *blockholder*, dan kualitas audit. Adapun variabel kontrol yang sama dengan penelitian Veronica dan Yanivi (2005) turut diujikan, yaitu *leverage*, *interest coverage*, dan ukuran perusahaan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka judul dari penelitian ini adalah **“Pengaruh Independensi Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Komisaris, Keahlian Keuangan Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan *Blockholder*, dan Kualitas Auditor terhadap Keterjadian *Restatement*”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka perumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah independensi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap keterjadian *restatement*?
2. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap keterjadian *restatement*?
3. Apakah keahlian keuangan komite audit berpengaruh negatif terhadap keterjadian *restatement*?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap keterjadian *restatement*?
5. Apakah kepemilikan *blockholder* berpengaruh negatif terhadap keterjadian *restatement*?
6. Apakah kualitas audit berpengaruh negatif terhadap keterjadian *restatement*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memberikan bukti empiris berkenaan dengan pengaruh independensi dewan komisaris terhadap keterjadian *restatement*.
2. Memberikan bukti empiris berkenaan dengan pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap keterjadian *restatement*.
3. Memberikan bukti empiris berkenaan dengan pengaruh keahlian keuangan komite audit terhadap keterjadian *restatement*.
4. Memberikan bukti empiris berkenaan dengan pengaruh kepemilikan institusional terhadap keterjadian *restatement*.

5. Memberikan bukti empiris berkenaan dengan pengaruh kepemilikan *blockholder* terhadap keterjadian *restatement*.
6. Memberikan bukti empiris berkenaan dengan pengaruh kualitas audit terhadap keterjadian *restatement*.

1.4 Manfaat Penelitian

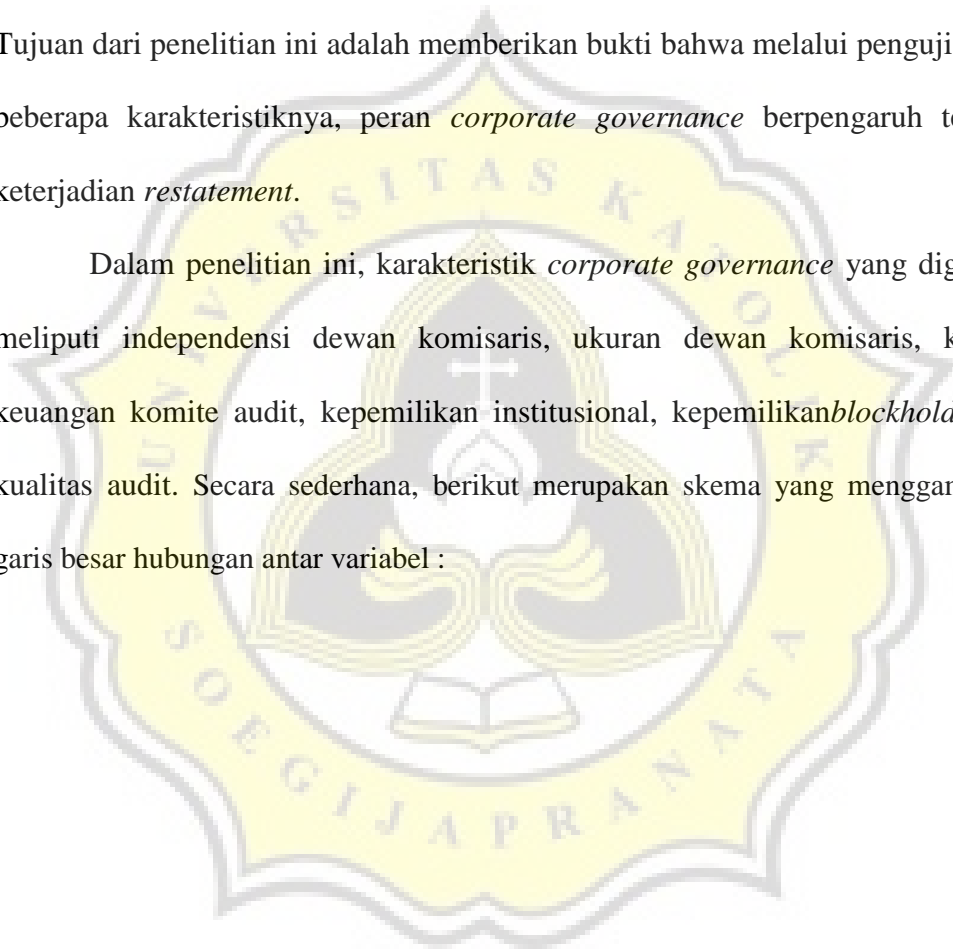
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

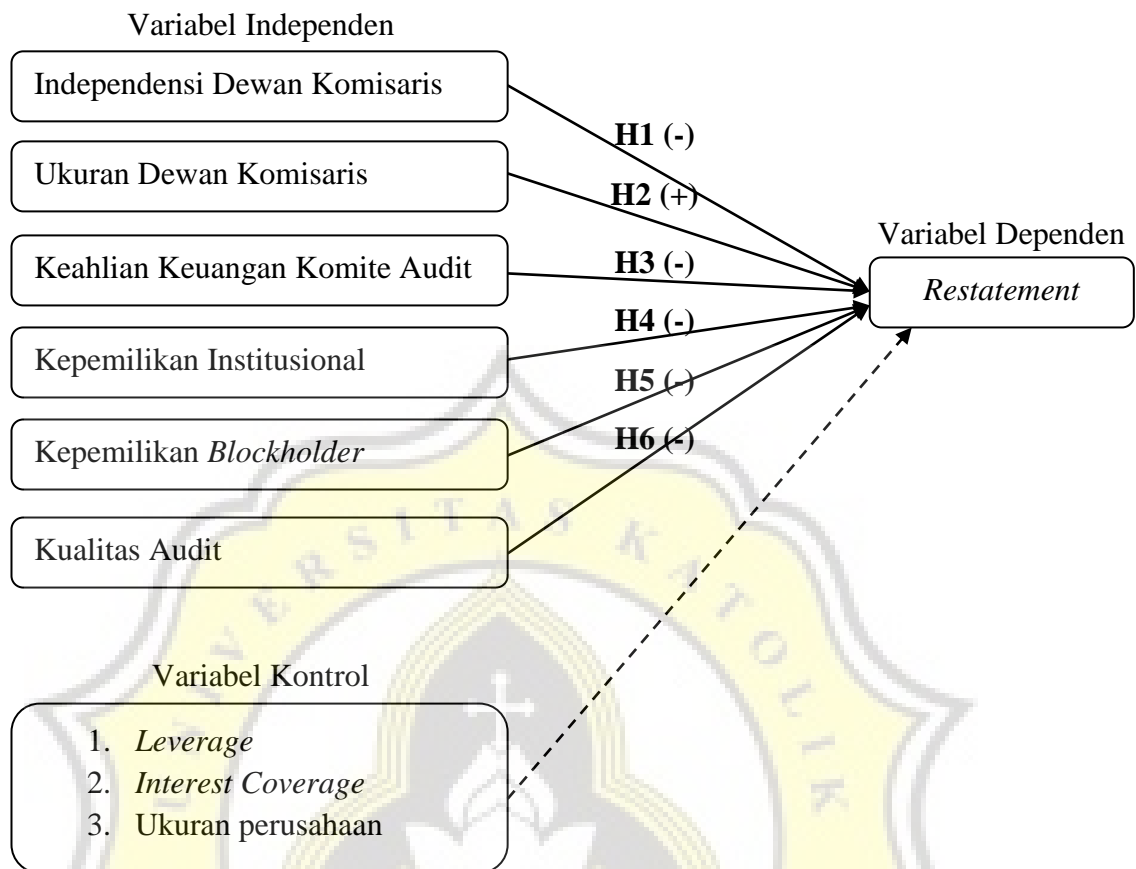
1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan menambah bukti empiris dan bahan referensi untuk melakukan penelitian lanjutan berkenaan dengan pengaruh karakteristik *corporate governance* terhadap keterjadian *restatement*.
2. Bagi perusahaan, dengan penelitian ini diharapkan diperoleh informasi berkenaan dengan karakteristik *corporate governance* yang berpengaruh terhadap keterjadian *restatement*, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan berkaitan dengan pencegahannya.
3. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran tentang peran tata kelola perusahaan dalam meningkatkan keandalan informasi dalam laporan keuangan. Investor dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan dengan mereview *corporate governance* suatu perusahaan sehingga dapat lebih berhati-hati pada kapasitas manajemen dalam memanipulasi informasi di laporan keuangan.

1.5 Kerangka Pikir

Kasus manipulasi laporan keuangan tidak jarang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di berbagai belahan dunia. Terjadinya manipulasi laporan keuangan yang kelak dikoreksi dalam bentuk *restatement* menjadi tanda bahwa perusahaan tidak menjalankan mekanisme *corporate governance* dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan bukti bahwa melalui pengujian pada beberapa karakteristiknya, peran *corporate governance* berpengaruh terhadap keterjadian *restatement*.

Dalam penelitian ini, karakteristik *corporate governance* yang digunakan meliputi independensi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, keahlian keuangan komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan *blockholder*, dan kualitas audit. Secara sederhana, berikut merupakan skema yang menggambarkan garis besar hubungan antar variabel :





1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pikir, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Pada bagian ini dijelaskan mengenai landasan teori yang mendasari diadakannya penelitian dan pengembangan hipotesis.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini diuraikan secara mendetail mengenai Penentuan Populasi dan Sampel, Sumber dan Jenis Data, Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian, dan Alat Analisis Data.

BAB IV Hasil dan Analisis

Pada bab ini berisi Deskripsi Objek Penelitian, Analisis Data, serta Interpretasi Hasil sebagai pembahasan hasil penelitian.

BAB V Kesimpulan, Keterbatasan, dan Implikasi

Pada bab ini dipaparkan Simpulan peneliti, Keterbatasan, serta Implikasi dari penelitian ini.

